

# PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS PENGAWAS PENDIDIKAN

Oleh:  
Sururi

## Abstrak

Menurut Henry Fayol (Harahap 2001), pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut Duncan (Harahap 2001), pengawasan adalah tindakan yang menentukan apakah rencana tercapai atau tidak.

Sebuah organisasi pendidikan baik itu secara makro, meso maupun mikro. Peran pengawasan sangatlah esensial untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika di Indonesia pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Maka peran pengawasan sebetulnya sebagai *supporting system* pendidikan itu. Atau yang akan mendukung atau menguatkan pencapaian tujuan sehingga prinsip pengawasan yaitu mencari fakta kesalahan atau penyimpangan harus dihilangkan, karena prinsip sebenarnya adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mendapatkan kebenaran atau istilah yang biasa digunakan adalah *das sollen* (pelaksanaan yang semestinya).

**Kata Kunci:** Profesionalitas dan Pengawas Pendidikan

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dan awal, selama dalam proses, dan akhir proses manajemen. Istilah pengawasan dalam proses organisasi bersifat umum sehingga terdapat beberapa pengertian yang sangat bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan, serta pembatasannya atau pengevangannya (Kos and Rosenzweig, 1981). Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajer dapat memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar peristiwa dan kegiatan dalam organisasi serasi dengan rencana.

Setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda (tergantung pada misi, jenis, bentuk dan sebagainya), tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama. Tahapan-tahapan tersebut yaitu: penentuan standar, pengukuran, perbandingan hasil pengukuran hasil standar, dan upaya "corection action". Oteng Sutisna ( 1986 ) bahkan meringkasnya menjadi tiga langkah besar: 1) menyelidiki apa yang sedang dilakukan, 2) membandingkan hasil-hasil dengan harapan, dan 3) menyetujui hasil-hasil itu atau tidak menyetujuinya, dalam hal yang terakhir perbaikan yang hendaknya diambil.

## **B. WAWASAN PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS PENGAWAS**

Dalam literature manajemen, pengawasan diartikan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjainin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan kemudian membetulkannya dan mencegah perulangnya. Pengawasan dalam konsep ini berkaitan dengan orang, kegiatan dan benda (Oteng Sutisna,1986).

Di dalam satuan pendidikan/lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi, pengawasan harus selalu hadir untuk senantiasa melengkapi proses adininistrasi dan manajemen untuk selanjutnya mencapai tujuan pendidikannya. Atau dengan kata lain, pengawasan harus menjadi payung bagi input, output dan proses tadi, atau sistem di satuan pendidikan tadi. Terutama dalam tahap prosesnya. Tujuannya untuk menjaga agar kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dan rencana yang telah ditetapkan. Atau, secara umum fungsi *controlling/* pengawasan menjadi faktor utama dalam adininistrasi pendidikan khususnya di sekolah.

Fungsi pengawasan dalam pendidikan, terutama di tingkat mikro (sekolah) tentunya akan membentuk sebuah kultur organisasi pendidikan yang sehat atau progresif. Dalam artian, pengawasan menjadi sebuah kultur atau *operating system* dalam organisasi. Terutama dalam adininistrasi dan manajemen di sekolah ataupun satuan pendidikan yang lain. Secara *birokratif*, fungsi pengawasan adalah untuk mengungkap penyimpangan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga hal itu menjadi bahan untuk melakukan perbaikan.

### C. PROFESIONALITAS DALAM BIDANG KEPENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN

Profesionalitas mengacu kepada sikap anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya (Sanusi,2008). Berdasarkan uraian tersebut, pengetahuan dan keahlian tersebut merujuk pada bagaimana seorang pengawas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan di sekolah pengawasan dipakai dalam dua arti:

*Pertama* pengawasan meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun menilik, mempertimbangkan, dan menilai. Perhatiannya berpusat pada pelaksanaan-pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Kegiatan pengawasan semacam ini dipikirkan terutama sebagai proses penerapan kekuasaan melalui alat dan teknik pengawasan untuk menetapkan apakah rencana-rencana, kebijaksanaan-kebijaksanaan, instruksi-instruksi, dan prosedur-prosedur yang ditetapkan diikuti (Oteng Sutsina, 1986).

*Kedua*, pengawasan yang menyediakan kondisi yang perlu untuk menyelesaikan tugas kewajiban dengan efektif dan efisien. Pengawasan dalam pengertian ini hendak menjamin keselarasan, kecerdasan, dan ekonomi pada semua upaya pendidikan. Pengawasan bias digunakan tidak hanya untuk mencegah salah, melainkan juga mengarahkan tindakan-tindakan pada tujuan organisasi sekolah.

Berdasarkan konsep tersebut, pelaksanaan pengawasan di sekolah harus mencakup pengendalian yang bersifat administrative dan akademik atau proses pengajaran. Tetapi dalam prakteknya pelaksanaan pendidikan yang selama ini diterapkan cenderung hanya menyangkut aspek material saja seperti pemeriksaan keuangan, fasilitas, tata usaha kantor, sedangkan pengamatan dan pengendalian terhadap proses belajar mengajar sering kali luput dari perhatian. Bahkan pengawasan terhadap keseluruhan aspek dari fungsi manajemen pun tetap belum terlaksana.

Pengawas di lembaga pendidikan selama ini lebih menonjolkan segi fisik, seperti pengelolaan dana, alat, bangunan, dan pegawai yang kurang mendapat perhatian, padahal merupakan sasaran yang amat penting, adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah (Djam'an Satori, 1990).

## **D. PROFESIONALITAS DALAM SUPERVISI MANAJERIAL DAN AKADEMIK**

Dalam kegiatan pengawasan pendidikan profesionalitas pengawas melingkupi supervisi manajerial dan akademik.

### **1. Supervisi Manajerial**

Supervisi manajerial adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan beberapa komponen/substansi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

#### **a. Substansi pengawasan pendidikan di sekolah: Kesiswaan**

Pengawasan dan pengelolaan dalam urusan kesiswaan di sekolah harus menitikberatkan pada siswa sebagai objek dan subjek didik. Karena itu sekolah haruslah memahami perbedaan individu anak, mengetahui kebutuhannya, mengetahui minatnya, dan mengetahui cita-citanya. Karena itu pula perlu bimbingan dan penyuluhan, pengelompokan dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengelompokan siswa pada pokoknya dibagi 3 macam yaitu:

1. pengelompokan berdasarkan prestasi belajar  
artinya, siswa-siswa dalam kelompok ini terdiri dari peserta didik yang memiliki prestasi akademik yang membanggakan di sekolahnya misalnya mempunyai prestasi peringkat 1-3, kemudian juara umum di sekolah, prestasi mata pelajaran tertentu, dsb.
2. Pengelompokan berdasarkan minat
3. Pengelompokan berdasarkan tugas-tugas yang diberikan guru kepentingan kelas atau sekolah.

#### **b. Substansi pengawasan pendidikan di sekolah: Kurikulum**

Kurikulum di sekolah hendaknya disesuaikan dengan kemampuan, minat dan kebutuhan dan tuntutan siswa. Selain itu, tentu harus relevan dengan visi, dan tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Perumusan kurikulum terdiri dari empat komponen dasar yang sangat berhubungan satu sama lain. Diantaranya isi kurikulum, tujuan kurikulum, evaluasi dan kegiatan belajar mengajar.

#### **c. Substansi pengawasan pendidikan di sekolah: Sarana dan Prasarana**

Pengawasan pengelolaan mesti mendapat perhatian dan kepala sekolah. Setiap sekolah harus memiliki asumsi "Manajemen dan Pengawasan" yang mencakup kepada semua komponen sekolah seperti tenaga kependidikan & pendidik, keuangan, kurikulum, kesiswaan, dan yang terakhir adalah yang sekarang sedang kita bahas yakni sarana dan prasarana sekolah.

Sarana prasarana yang di singkat menjadi sarpras terdiri dan 4 kelompok, yaitu *site, building, furniture, dan equipment*. Dan semuanya harus dikelola dengan baik dengan didukung oleh *system pengawasan* yang baik pula. Pengelolaan dan pengawasan sarpras memiliki alur perencanaan pengadaan-inventarisasi-penyimpanan-penggunaan-pemeliharaan-dan penghapusan.

**d. Substansi pengawasan pendidikan di sekolah: Tenaga pendidik dan kependidikan**

Personil sekolah atau juga bisa dikatakan sebagai warga sekolah diantaranya siswa, guru, personil, tata usaha, orang tua siswa dan anggota masyarakat yang berminat pada pendidikan khususnya di sekolah.

Pengawasan personil sekolah dimaksudkan supaya terciptanya pelayanan pendidikan/ pengajaran terhadap siswa sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Mengingat sekolah merupakan media pembelajaran bagi semua personil sekolah, agar supaya efektif dan efisien maka personil sekolah harus professional akan setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya disertai dengan etos kerja yang baik pula, terutama pegawai tata usaha yang harus melayani siswa atau mahasiswa ( di perguruan tinggi) dalam urusan akademiknya.

Karena itu kepala sekolah dan wakilnya sebagai pengawas hendaknya memahami dan bisa mengaplikasikan mengenai teori dan tingkah laku staf sekolah tersebut. Mampu memecahkan masalah yang dihadapi mereka dan mampu membuat keputusan yang tepat hal mi sesuai kenyataan bahwa kualitas sekolah itu terletak pada tugas dan tanggung jawab pimpinan sekolah dan guru.

Pengawasan personil sekolah biasanya ada kaitannya dengan penyeleksian, penempatan dan pembinaan.

Proses penyeleksian tenaga kependidikan dan pendidik sebaiknya melalui proses yang selektif dan objektif/ transparan. Ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas mutu pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan

Kemudian pembinaan yang amat penting ialah pembinaan terhadap profesinya melalui supervisi, penataran, buku-buku bacaan dsb. Disamping pembinaan terhadap kesejahteraannya.

**e. Substansi pengawasan pendidikan di sekolah:  
Anggaran/Keuangan sekolah**

Konsep biaya secara umum berlaku dalam produksi barang atau jasa. Produksi barang atau jasa yang memerlukan sejumlah pengorbanan dari para pemilik faktor produksi. Jika seorang pemilik faktor produksi menyerahkan faktor produksi kepada seorang produsen atau pemasok barang atau jasa, maka biaya bagi pemilik faktor produksi yaitu hilangnya pemakaian (*consumption forgone*). Karena itu produsen wajar memperoleh biaya sebagai pengganti kerugian atas sejumlah faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut, baik berupa upah, gaji, honorarium, bunga, sewa, maupun ongkos-ongkos pembayaran lainnya.

Menurut J. Hallak (1969) dalam Analisis Biaya Pendidikan, biaya dalam arti yang umum yaitu dalam bentuk moneter/uang. Sementara STEPPES, Biro Perencanaan, Depdikbud (1989) menyatakan bahwa konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pendidikan baik oleh pemerintah, perorangan dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Biaya dalam pengertian yang bagi konsumen pemakai barang/jasa dianggap mewakili biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh produsen dan konsumen.

Tentu saja dengan asumsi bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan atau bersifat pelayanan umum. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa biaya pendidikan adalah biaya bagi pemerintah, masyarakat, keluarga atas berlakunya sistem pendidikan nasional. Artinya produsen, dan konsumen berbaaur menjadi satu transaktor ekonomi. Konsep ini mengandung makna bahwa seluruh usaha yang dicurahkan pemerintah dan masyarakat/orang tua, terhadap pendidikan, baik berupa uang/moneter maupun non moneter, memerlukan penginventarisasian yang jelas.

Dalam kaitan ini Zymelman (1975) dengan jelas mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana itu secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu dengan pengelolaan dana secara baik akan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

## 2. Supervisi Akademik

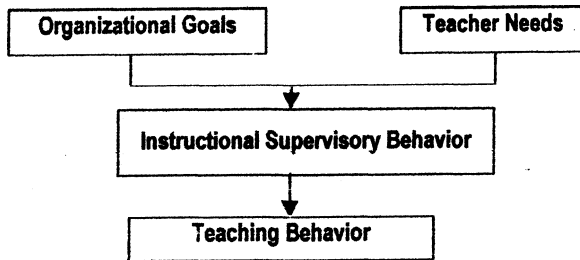
Pengawasan merupakan bagian dari fungsi administrasi pendidikan yang pelaksanaannya ditekankan pada pengawasan proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan istilah supervisi pendidikan (*instructional supervision*). Istilah supervisi pendidikan (*instructional supervision*) disebut juga *educational supervision* yang mengacu pada misi utama organisasi pendidikan dalam sekolah, yaitu kegiatan pengawasan pendidikan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. (Djam'an Satori).

Dalam Undang Undang Nomor 20/2003 antara lain dijelaskan bahwa salah satu tenaga kependidikan adalah Pengawas Sekolah yang berkewajiban menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan peningkatan mutu, dan pelayanan sekolah. Selanjutnya, Berdasarkan PP N0. 19 Tahun 2005 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Permen Diknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengawas pendidikan wajib memiliki kompetensi, yakni kompetensi persyaratan rekrutmen, kompetensi profesi dan kompetensi personal.

Pengawasan mempunyai fungsi agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan merupakan suatu hasil kerja yang sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditentukan. Fungsi sentral supervisi adalah pembinaan ke arah perbaikan (*improvement*) dan/atau peningkatan (*development*) situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya, khususnya perbaikan dan peningkatan mutu belajar peserta didik melalui bantuan "beberapa bimbingan atau tuntunan kepada guru-guru untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya".

Supervisi dinamik, yaitu supervisi yang diarahkan untuk mengubah secara lebih intensif praktik-praktik pengajaran tertentu. Tekanan perubahan ini diletakkan pada dis kontinuitas, gangguan terhadap praktik yang ada sekarang untuk diganti dengan yang baru, sehingga dapat mempengaruhi perilaku peserta didik, guru, dan semua personil sekolah. Di dalam praktiknya kegiatan supervisi tidak selalu berupa jenis kegiatan yang dapat digolongkan pada dua kutub secara mutlak, tetapi seringkali merupakan kegiatan yang berada pada kontium dua kutub tersebut.

Alfonso menghubungkan tujuan supervisi pengajaran dengan sumber dan arah supervisi pengajaran seperti tertera pada gambar 2.3 berikut.



**Gambar 1.1**  
**Sumber, Arah dan Tujuan Supervisi Pengajaran**  
 (Alfonso , 1991:28)

Gambar di atas menunjukkan bahwa tujuan organisasi (sekolah) dan kebutuhan guru diidentifikasi sebagai sumber perilaku supervisi pengajaran. Supervisor pengajaran (Pengawas sekolah dan Kepala sekolah dituntut untuk memahami dan peka terhadap tujuan sekolah (organisasi), dan kebutuhan guru-guru sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya.

Efektifitas pelayanan supervisi pengajaran dipengaruhi banyak aspek, terutama aspek pengetahuan dan keterampilan dari pelaksana supervisi pengajaran itu sendiri. Glickman (1985:5), mengemukakan bahwa: *"Effective supervision requires knowledge, interpersonal skills, and technical skills"*.

Keterampilan berhubungan (*interpersonal skills*) yang dimaksud adalah berkaitan dengan hubungan atau komunikasi dengan guru baik secara individual maupun secara kelompok. Sedangkan keterampilan teknis (*technical skills*) berkaitan dengan kegiatan observasi kelas, perencanaan kegiatan, penilaian dan perbaikan pengajaran. Hal tersebut jelas diungkapkan oleh Glickman (1985:7), sebagai berikut: *"... the supervisor must have technical skills in observing, planning, assessing, and evaluating instructional improvement"*.

Ketiga persyaratan tersebut (*knowledge, interpersonal skills, dan technical skills*), merupakan tuntutan mutlak untuk dapat melaksanakan tugas atau kegiatan supervisi pengajaran secara efektif. Tugas atau kegiatan supervisi pengajaran tersebut diungkapkan oleh Glickman (1985:7), bahwa: *"...direct assistance, curriculum development, inservice education, group development, and action research"*.



## **E. PENUTUP**

Seorang pengawas perlu memiliki wawasan dasar yang berkenaan dengan kepengawasan manjerial dan akademik, untuk meningkatkan produktivitas pendidikan di tingkat persekolahan, yakni bagaimana fungsi kepengawasan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Oleh karena itu, seorang pengawas perlu memiliki sikap profesionalitas kerja yang mampu mendukung fungsi dan perannya dengan memiliki pemahaman terhadap substansi pengawasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan pemahaman serta penguasaan terhadap supervisi pengajaran

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pemeriksa Keuangan RI, (1983). *Norma-Norma Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, Jakarta. :Sekretaris Jenderal BEPEKA.
- Bebby C.E., (1979), *Assessment of Indonesia Education: A Guide in Planning*, Wellington, New Zealand CER, OUP.
- Cronbach, Lee J., et all, (1980). *Toward Reform of Program Evaluation*, London Jossey-Bass Publisher.
- Gaffar, M.F., (1990), *Pengawasan Dalam Manajemen Nasional Pendidikan*, Makalah Seminar Manajemen Nasional Pendidikan, IKIP Bandung.
- Kast, Fremont E. and James E. Rosenweg, (1981), *Organization and Management; Asistem of Management Function*, Kogakusha Tokyo McGraw-Hill Inc.
- Ray E., B dan Grimsley, Edit E. (1987), *Reading in Education Supervision*. New York: ASCD.
- UU No. 2o Tahun, (2003), *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Satori Djam'an, (1990), *Kendali Mutu Pendidikan Persekolahan*, Makalah SMNP, IKIP Bandung.
- Wahjosumidjo, (2001), *Kepemimpinan kepala sekolah*, Jakarta; PT Raja G rafindo
- Drs. Sururi, M.Pd** adalah Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, FIP-Universitas Pendidikan Indonesia.